

LAPORAN

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

2024



TRIWULAN II
Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 12 Juli 2024

Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya



Dr. H. Japar M. Pd

NIP. 196812311994031026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan atas karunia, hidayah serta inayah-Nya, Laporan Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran persepsi peserta pelatihan terkait korupsi selama berlangsungnya kegiatan pelatihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Panitia **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak pelaksanaan survei hingga penyusunan laporan ini. Segala saran dan masukan sangat diperlukan karena kami menyadari adanya kekurang- sempurnaan dalam laporan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya**.

Surabaya, Juli 2024

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG.....	6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN.....	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI.....	7
BAB II METODE PENGUKURAN	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL.....	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT	8
2.3. RESPONDEN.....	8
2.4. KUESIONER.....	8
2.5. NILAI PERSEPSI	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. PROFIL RESPONDEN.....	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK	15
3.3. REKAPITULASI NILAI	23
BAB IV PENUTUP	27
4.1. KESIMPULAN.....	27
4.2. REKOMENDASI	27
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden.....	13
Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden.....	14
Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden.....	14
Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden.....	15
Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan.....	16
Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan.....	17
Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh.....	18
Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah.....	18
Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya.....	19
Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan.....	20
Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang.....	21
Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia.....	22
Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan.....	22
Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	23
Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan.....	25
Gambar 3.16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Persepsi 9

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya April – Juni 2024 10

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei 13

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan 16

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan 16

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh 17

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah 18

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya 19

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan 20

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang 20

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia 21

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan 22

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan 23

Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya 24

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter Pemerintah yang Bersih dan Melayani.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi UPT Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan diklat di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 59 tahun 2015, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat yang diselenggarakan terdiri dari diklat sebelum pegawai menduduki jabatan (pelatihan dasar/latsar), diklat dalam jabatan dan diklat kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta diklat. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan kediklatan yang bebas dari korupsi, dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedangkan IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilakukan dalam kurun waktu Bulan April hingga Juni Tahun 2024 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

BAB II

METODE PENGUKURAN

2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta Pelatihan BDK Surabaya baik itu dalam pola klasikal maupun campuran, yang diselenggarakan selama Bulan April hingga Juni Tahun 2024. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online* via *google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan sejak April hingga Juni 2024. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat pelatihan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/spak2024>

2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama Bulan April hingga Juni 2024. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu "selalu", "sering", "jarang", "tidak ada" dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Triwulan II Tahun 2024, BDK Surabaya setidaknya telah melaksanakan 67 Pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola tatap muka dan dalam jaringan melalui skema Pelatihan di Wilayah Kerja pola campuran serta pelatihan reguler dalam kampus. Berikut ditabulasikan pelatihan yang diselenggarakan selama Bulan April hingga Juni 2024 beserta jenis dan pola pelatihannya.

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya April – Juni 2024

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Dana BOS Kab. Mojokerto	26 Maret -5 April 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
2	Pelatihan Teknis Manajemen Penyelenggaraan Pondok Pesantren Kota Pasuruan	26 Maret -5 April 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
3	Pelatihan Teknis Public Speaking Kota Kediri	26 Maret -5 April 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
4	Pelatihan PPMB III	22 - 26 April 2024	Pelatihan Administrasi	Reguler
5	Pelatihan Teknis Public Speaking Kabupaten Ponorogo	24 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
6	Pelatihan Teknis Public Speaking Kabupaten Tuban	24 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
7	Pelatihan Teknis Keprotokolan	6 - 17 Mei	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
8	Pelatihan Teknis Public Speaking	6 - 17 Mei	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
9	Pelatihan Teknis Penilaian Kinerja	13-17 Mei	Pelatihan Administrasi	Reguler
10	Pelatihan Teknis Manajemen Perpustakaan Kab. Tuban	29 mei - 7 juni	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
11	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pndok Pesantren Kab. Kediri	29 mei - 7 juni	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
12	Pelatihan Teknis Pengelolaan BOS Kab. Tulungagung	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended

13	Pelatihan Teknis Public Speaking Kab. Pamekasan	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
14	Pelatihan Metodologi Pembelajaran Kota Mojokerto	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
15	Pelatihan Metodologi Pembelajaran Kab. Pasuruan	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
16	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Kab. Bangkalan	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
17	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Kab. Gresik	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
18	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Kab. Probolinggo	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
19	Pelatihan Pembelajaran Tematik RA Kota Madiun	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
20	Pelatihan PPMB IV	22 - 26 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
21	Pelatihan PPPMB V	22 - 26 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
22	Pelatihan B. Indonesia MTs	22 - 26 April 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
23	Pelatihan Pembelajaran Madin Kab. Magetan	24 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
24	Pelatihan IKM Kab. Ngawi	24 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
25	Pelatihan IKM Kab. Jember	24 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
26	Pelatihan B. Inggris MTs	29 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
27	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka	29 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
28	Pelatihan B. Inggris MTs	29 April - 3 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
29	Pelatihan IKM Ak. I	29 April - 3 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
30	Pelatihan IPA MTs	13 - 18 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
31	Pelatihan Kimia MA	13 - 18 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
32	Pelatihan IKM Kab. Trenggalek	6 - 17 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
33	Pelatihan Calon Pengawas Ak. I	25 Maret - 22 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	In - On -In
34	Pelatihan Calon Pengawas Ak. II	25 Maret - 22 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	In - On -In
35	Pelatihan IKM Ak. II	27 Mei - 1 Juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
36	Pelatihan IKM Ak. III	27 Mei - 1 Juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
37	Pelatihan Ekonomi MA	27 Mei - 1 Juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
38	Pelatihan PPMB VIII	27 - 31 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
39	Pelatihan PPMB IX	27 - 31 Mei	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
40	Pelatihan Tematik RA Kab. Situbondo	29 mei s.d. 7 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
41	Pelatihan Kurmer Kab. Bondowoso	29 mei s.d. 7 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
42	Pelatihan Madin Kab. Sumenep	29 mei s.d. 7 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended

43	Pelatihan IKM Pengawas	3 s.d. 8 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
44	Pelatihan Seni Budaya	3 s.d. 8 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
45	Pelatihan SKI MTs	3 s.d. 8 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
46	Pelatihan PPMB X	3 s.d. 7 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
47	Pelatihan PPMB XI	3 s.d. 7 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
48	Pelatihan Madin Kab. Mojokerto	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
49	Pelatihan Madin Kab. Malang	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
50	Pelatihan TIK MTs Kota Batu	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
51	Pelatihan Kurmer B. Arab	10 s.d. 15 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
52	Pelatihan Kurmer Biologi	10 s.d. 15 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
53	Pelatihan Kurmer Matematika	10 s.d. 15 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
54	Pelatihan IKM Pengawas	10 s.d. 15 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	Reguler
55	Pelatihan IKM Kepala RA Kab. Lamongan	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
56	Pelatihan IKM MI Kab. Magetan	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
57	Pelatihan IKM MTs Kep. Masalembu	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
58	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar	26 Maret - 5 April 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
59	Pelatihan PPMB VI	29 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	Reguler
60	Pelatihan PPMB VII	29 April - 3 Mei 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	Reguler
61	Pelatihan Keluarga Sakinah	6 - 17 Mei	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
62	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama	6 - 17 Mei	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
63	Pelatihan Manajemen Wakaf	6 - 17 Mei	Pelatihan Teknis Keagamaan	Reguler
64	Pelatihan Keluarga Sakinah Kab. Trenggalek	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
65	Pelatihan Manajemen Kemasjidan Kab. Probolinggo	5 s.d. 14 juni	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
66	Pelatihan Keluarga Sakinah Kab. Madiun	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended
67	Pelatihan Keluarga Sakinah Kab. Bondowoso	19 s.d. 28 juni	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Blended

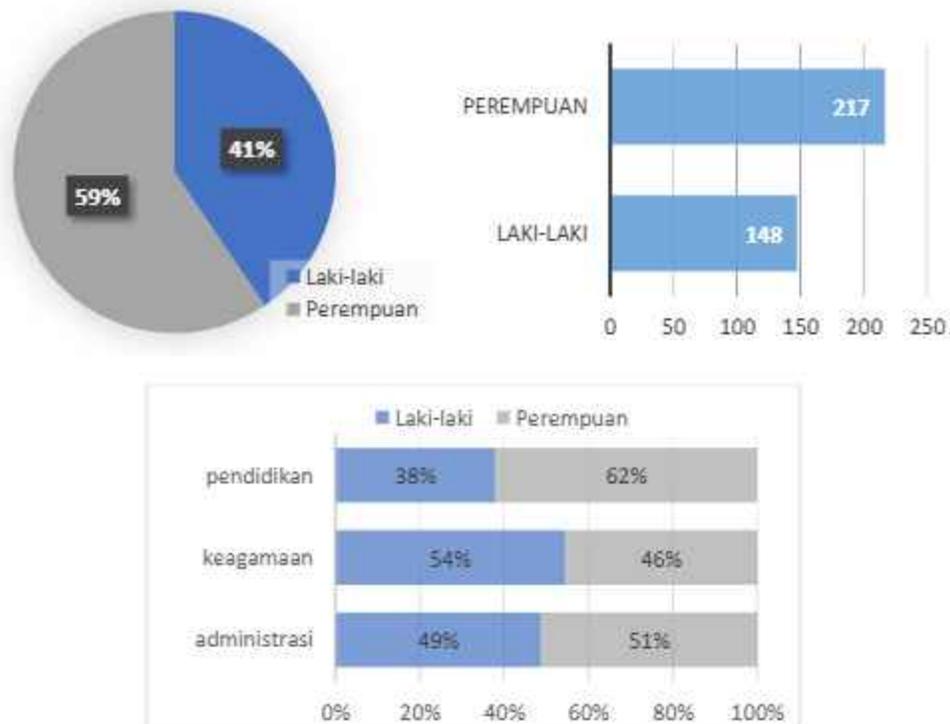
Selama periode survei, sebanyak **365 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam triwulan kedua Tahun 2024, tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan adalah sebanyak **291 responden**. Tingkat partisipasi survei untuk Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan sebanyak **36 responden** sedangkan tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Administrasi

adalah sebanyak **39 responden**. Responden tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori responden untuk diketahui karakteristiknya.

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei

Jenis Pelatihan	Jumlah Responden Terlibat
Pelatihan Teknis Pendidikan	291
Pelatihan Teknis Keagamaan	36
Pelatihan Administrasi	39

Partisipasi peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh BDK Surabaya selama Triwulan II tahun 2024 didominasi oleh peserta perempuan dengan porsi 59 persen. Dari gambar 3.1 ditunjukkan bahwa dari total 365 responden, sebanyak 217 orang adalah perempuan sedangkan sisanya adalah laki-laki. Namun jika diperhatikan per rumpun pelatihan, tampak variasi dalam karakteristik gender responden. Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 62 persen dari 291 responden. Sebaliknya, laki-laki lebih mendominasi Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan yaitu 54 persen dari 36 responden. Berbeda halnya dengan Pelatihan Tenaga Administrasi yang cenderung seimbang antara peserta laki-laki dan perempuan yakni 49 persen berbanding 51 persen



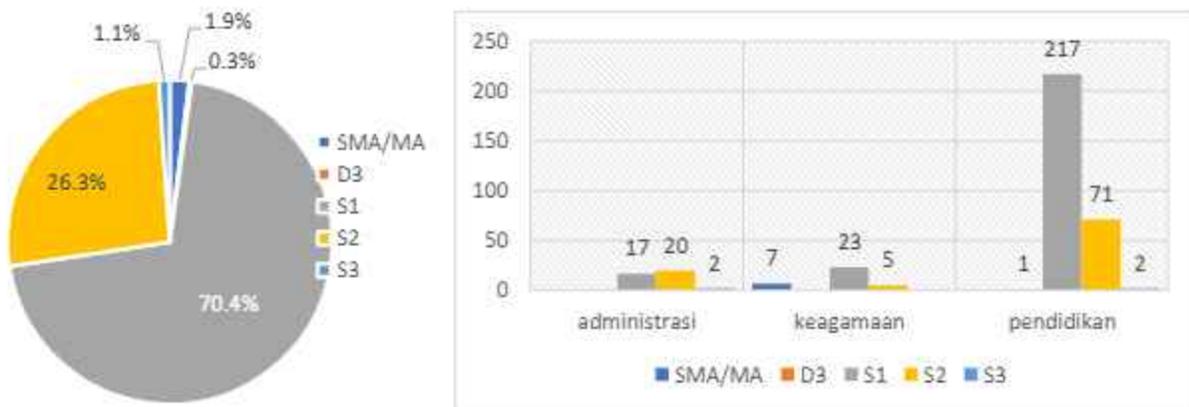
Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

Secara umum, responden didominasi oleh peserta pelatihan dalam kelompok umur 40-49 tahun. Disusul oleh kelompok peserta dalam rentang usia di atas 49 tahun, dan kelompok usia 30-39 tahun. Pada setiap rumpun pelatihan, tampak perbedaan karakteristik kelompok umur responden. Responden dari Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan lebih didominasi oleh peserta dalam kelompok usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun masing-masing dengan persentase 37 persen dan 38 persen.



Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

Responden pada Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan lebih banyak berasal dari kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 37 persen. Disusul oleh kelompok usia 40-49 tahun dan di atas 49 tahun dengan proporsi masing-masing sebesar 29 persen dan 26 persen. Sedangkan Pelatihan Tenaga Administrasi tampak didominasi oleh peserta dalam rentang usia 40-49 yakni sebanyak 59 persen. Disusul oleh peserta dalam rentang usia di atas 49 tahun sebanyak 36 persen, sisanya tersebar dalam kelompok usia kurang dari 30-39 tahun seperti tampak pada gambar 3.2.

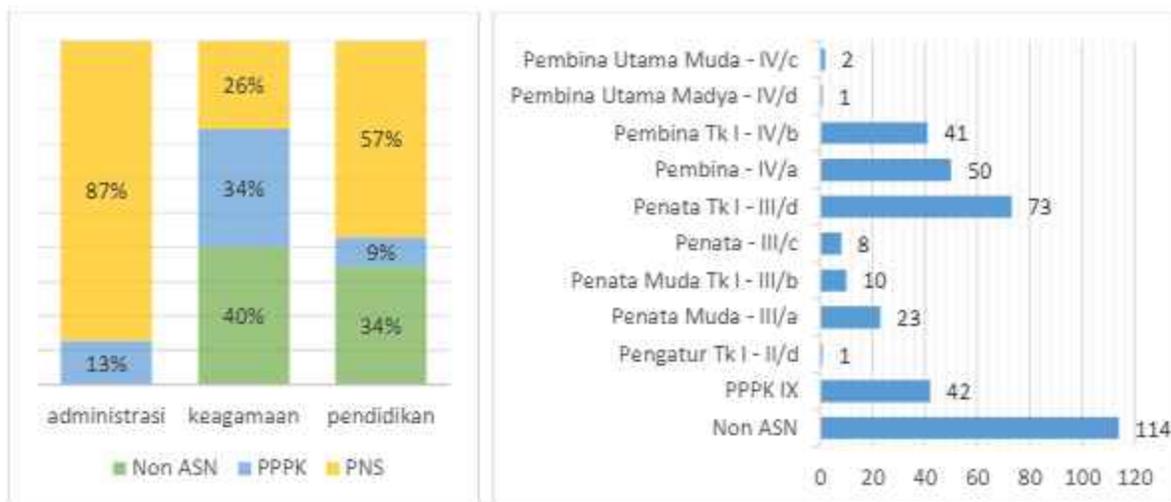


Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Dari keseluruhan peserta pelatihan BDK Surabaya selama triwulan kedua tahun 2024, sebanyak 70,4 persen dari populasi merupakan tamatan sarjana, disusul oleh para magister sebanyak 26,3 persen. Sisanya tersebar dalam kelompok pendidikan SMA/MA, doktoral, dan

diploma, masing-masing dengan persentase 1,9 persen, 1,1 persen, dan 0,3 persen. Para sarjana mendominasi Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Sedangkan responden Pelatihan Tenaga Administrasi lebih banyak dari kalangan magister.

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bukan hanya diperuntukan bagi PNS melainkan juga untuk Non ASN dan PPPK. Dalam kurun waktu April hingga Juni 2024, peserta Non ASN dan PPPK telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Berdasarkan gambar 3.4 tampak adanya perbedaan karakteristik di setiap rumpun pelatihan. Pelatihan Tenaga Administrasi didominasi oleh PNS dalam proporsi 87 persen. Senada dengan kepesertaan dalam Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan yang lebih banyak dari unsur PNS dengan proporsi 57 persen. Berbanding terbalik dengan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan yang pesertanya mayoritas merupakan Non ASN sebanyak 40 persen.



Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden

Selama triwulan kedua tahun 2024, peserta PNS cukup mendominasi. Dari total 365 responden, 57 persen di antaranya berstatus PNS. Sebanyak 73 orang dari golongan III/d. Sebanyak 114 responden merupakan Non ASN. Sebaran responden tampak pada gambar 3.4.

3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

a. Manipulasi Peraturan

Dari total responden sebanyak 365 responden, 359 orang di antaranya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Sebanyak 4 orang menyatakan jarang menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya, sisanya menganggap sering dan selalu ada manipulasi peraturan dalam pemberian layanan di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap indikator manipulasi peraturan mendapatkan indeks sebesar **3,98**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari manipulasi peraturan**.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0.27%
Sering	2	1	0.27%
Jarang	3	4	1.10%
Tidak Ada	4	359	98.36%
Jumlah		365	100%



Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

b. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1-4, persepsi mengenai penyalahgunaan jabatan berhasil mencapai indeks **3,99**. Indeks ini diperoleh berkat sebanyak 361 responden menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan di lingkungan BDK Surabaya. Sisanya menyatakan jarang melihat ada penyalahgunaan jabatan, yakni sebanyak 1,10 persen. Dari perolehan indeks tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0.00%
Sering	2	0	0.00%
Jarang	3	4	1.10%

Tidak Ada	4	361	98.90%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

c. Menjual Pengaruh

Dari total 365 responden, 350 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Sebanyak 10 orang menyatakan jarang ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruh untuk tindakan korupsi, sedangkan sisanya menyatakan sering dan selalu ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruhnya. Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan nilai persepsi sebesar **3,94** sehingga dapat disimpulkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	3	0.82%
Sering	2	2	0.55%
Jarang	3	10	2.74%
Tidak Ada	4	350	95.89%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

d. Hadiah

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, “Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta?” sebanyak 95,07 persen dari responden menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tersebut, 8 orang atau sekitar 2,19 persen menyatakan jarang, 0,55 persen menyatakan sering, dan sisanya sebanyak 8 orang atau sekitar 2,19 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka selalu memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak pernah diminta. Dari pengumpulan data ini, diperoleh indeks persepsi sebesar **3,90**. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	8	2.19%
Sering	2	2	0.55%
Jarang	3	8	2.19%
Tidak Ada	4	347	95.07%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

e. Transparansi Biaya

Biaya/tarif pelayanan yang dibebankan kepada peserta dalam rangka mengikuti Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) maupun Pelatihan Reguler dalam Kampus BDK Surabaya adalah 0 (nol) rupiah atau gratis. Di samping sertifikat, peserta juga berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium ini diserahkan setelah pelatihan berakhir dan dibuktikan melalui SPJ dan kitir yang diserahkan kepada masing-masing peserta. Melalui kitir inilah rincian honorarium peserta dapat dilihat.

Dalam rangka mengukur persepsi publik mengenai transparansi biaya di BDK Surabaya, tim survei mengajukan pertanyaan berupa, **“Apakah BDK Surabaya tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan?”**

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	19	5.21%
Sering	2	3	0.82%
Jarang	3	4	1.10%
Tidak Ada	4	339	92.88%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Dari total 365 responden, sebanyak 339 orang diantaranya menyatakan bahwa tidak ada pelaksana kegiatan yang terlupa memberikan bukti transaksi. Sebanyak 4 orang menyatakan jarang, 3 orang menyatakan sering, dan ada 19 orang yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan selalu tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses pelayanan pelatihan. Berdasarkan data tersebut, didapatkan indeks persepsi publik sebesar 3,82. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya BDK Surabaya bersih dalam hal transparansi biaya.

f. **Pencaloan**

Dari skala 1-4 unsur pencaloan memperoleh indeks persepsi sebesar 3,98. Hal ini berarti para responden menganggap bahwa layanan pelatihan yang diberikan oleh BDK Surabaya **bersih dari unsur pencaloan**. Jika diuraikan per skor, sebanyak 362 orang atau 99,14 persen dari total responden mengatakan bahwa tidak ada praktik pencaloan di BDK Surabaya. Sisanya masing-masing sebanyak 1 orang menyatakan bahwa mereka jarang, sering, dan selalu mengetahui adanya praktik pencaloan di BDK Surabaya.

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0.27%
Sering	2	1	0.27%
Jarang	3	1	0.27%
Tidak Ada	4	362	99.18%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

g. **Perbuatan Curang**

Dari total responden sebanyak 365 responden, 360 orang di antaranya menyatakan bahwa tidak ada praktik KKN di BDK Surabaya. Sisanya sebanyak 4 orang atau sekitar 1,10 persen menyatakan jarang melihat/mendengar adanya praktik KKN di BDK Surabaya dan 0,27 persen menyatakan sering melihat praktik KKN di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur perbuatan curang adalah sebesar **3,98**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik KKN** (perbuatan curang).

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0.00%
Sering	2	1	0.27%

Jarang	3	4	1.10%
Tidak Ada	4	360	98.63%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan kedua tahun 2024, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sebesar **3,99**. Terdapat 364 orang yang percaya bahwa tidak ada transaksi rahasia di BDK Surabaya, sisanya dengan proporsi 0,27 persen menganggap jarang ada praktik transaksi rahasia. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**.

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0.00%
Sering	2	0	0.00%
Jarang	3	1	0.27%
Tidak Ada	4	364	99.73%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

i. **Transparansi Aduan**

Sebanyak 365 responden atau sekitar 96,44 persen dari total responden mengatakan bahwa BDK Surabaya terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Dari skala 1-4, indeks persepsi yang diperoleh untuk unsur transparansi aduan adalah sebesar **3,91**. Berdasarkan perolehan indeks persepsi ini, BDK Surabaya dapat dikatakan **bersih dalam hal transparansi aduan**.

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	10	2.74%
Sering	2	1	0.27%
Jarang	3	2	0.55%
Tidak Ada	4	352	96.44%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

j. Respon Terhadap Aduan

Selama survei berlangsung, responden disuguhkan pertanyaan berupa, “Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?”. Terdapat 351 responden atau sekitar 96,16 persen yang menyatakan tidak ada respon lambat terhadap aduan terkait korupsi. Sebanyak 8 orang, atau sekitar 2,19 persen dari total responden mengatakan bahwa respon lambat terhadap aduan jarang terjadi di BDK Surabaya. Sebanyak 1 orang menyatakan bahwa BDK Surabaya sering merespon lambat aduan/laporan masyarakat terkait korupsi, sedangkan sekitar 1,37 persen sisanya mengatakan bahwa aduan/laporan terkait korupsi selalu direspon lambat oleh BDK Surabaya. Dalam skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur respon terhadap aduan mencapai indeks **3,93** yang berarti bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal respon terhadap aduan**.

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	5	1.37%
Sering	2	1	0.27%
Jarang	3	8	2.19%
Tidak Ada	4	351	96.16%
Jumlah		365	100,0%



Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

3.3. REKAPITULASI NILAI

Dari uraian penilaian unsur di atas, selanjutnya dibuat perbandingan antar unsur. Berdasarkan tabel 3.13 tampak bahwa unsur transaksi rahasia, penyalahgunaan jabatan, dan pencaloan merupakan tiga unsur yang mendapatkan nilai persepsi tertinggi. Masing-masing unsur tersebut memperoleh indeks persepsi rata-rata sebesar 3,98 sampai 4,00. Sedangkan unsur transparansi biaya merupakan unsur dengan nilai terendah daripada unsur yang lain. Tingkat

persepsi masyarakat untuk unsur ini hanya mencapai 3,82. Meski begitu, kesepuluh unsur yang dinilai semuanya dinyatakan **bersih dari korupsi** berdasarkan persepsi publik.

Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,98	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	3,99	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,94	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,90	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,82	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	3,98	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	3,98	Bersih dari korupsi
TRANSAKSI RAHASIA	3,99	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,91	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,93	Bersih dari korupsi
NILAI IPAK	3,94	Bersih dari korupsi

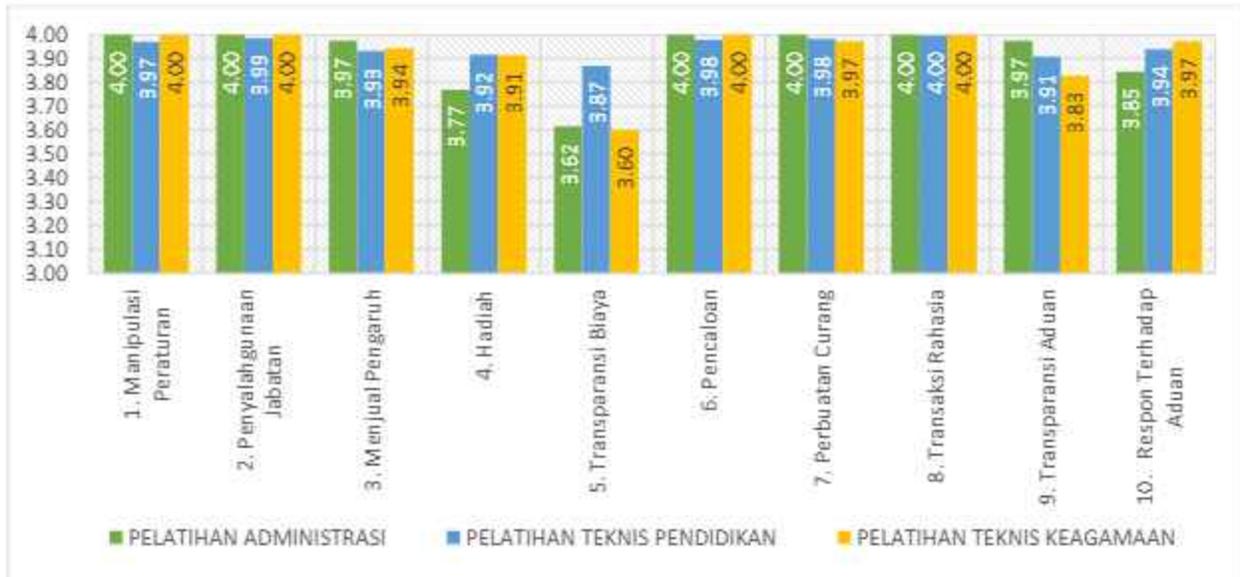
Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

UNSUR PENILAIAN	IPAK		
	PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI	PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
1. Manipulasi Peraturan	4,00	3,97	4,00
2. Penyalahgunaan Jabatan	4,00	3,99	4,00
3. Menjual Pengaruh	3,97	3,93	3,94
4. Hadiah	3,77	3,92	3,91
5. Transparansi Biaya	3,62	3,87	3,60
6. Pencaloan	4,00	3,98	4,00
7. Perbuatan Curang	4,00	3,98	3,97
8. Transaksi Rahasia	4,00	4,00	4,00
9. Transparansi Aduan	3,97	3,91	3,83
10. Respon Terhadap Aduan	3,85	3,94	3,97
NILAI IPAK	3,917	3,947	3,922

Ketiga rumpun pelatihan mendapatkan predikat “**bersih dari korupsi**” dengan perolehan IPAK yang berselisih tipis. Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dengan perolehan IPAK tertinggi yakni sebesar 3,947. Selanjutnya Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan yang memperoleh IPAK sebesar 3,922 serta Pelatihan Tenaga Administrasi dengan nilai IPAK sebesar 3,917.

Indeks persepsi anti korupsi untuk masing-masing unsur dapat dilihat di tabel 3.14. Pada Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, unsur transaksi rahasia merupakan unsur dengan perolehan indeks persepsi anti korupsi tertinggi. Pada Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan dan Pelatihan Tenaga

Administrasi, unsur manipulasi peraturan adalah unsur dengan perolehan indeks persepsi anti korupsi paling tinggi.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

Evaluasi terhadap hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan BDK Surabaya dapat dilakukan dengan mengurutkan dan membandingkan nilai IPAK terkecil untuk setiap unsur. Dari sepuluh unsur penyusun indeks persepsi anti korupsi, Balai Diklat Keagamaan Surabaya memiliki empat unsur yang nilainya di bawah IPAK.



Gambar 3.16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

Unsur tersebut adalah transparansi biaya, hadiah, transparansi aduan, dan respon terhadap aduan. Keempat unsur inilah yang seluruhnya memiliki nilai di bawah IPAK total. Unsur-unsur tersebut perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap BDK Surabaya yang bersih melayani.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik (peserta pelatihan).

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan kedua tahun 2024 mencapai nilai **3,94** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya bahwa layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari transaksi rahasia mencapai 3,99 dari skala 4 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya.
3. Unsur “transparansi biaya” merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori “bersih dari korupsi”.

4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap layanan BDK Surabaya antara lain:

1. Panitia kegiatan memberikan penjelasan mengenai rincian honorarium peserta pada saat pengarahan program pelatihan serta memberikan cetak fisik rincian honorarium peserta sebagai upaya transparansi biaya.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SP4N – LAPOR! dalam upaya penghimpunan aduan masyarakat terkait korupsi. Penghimpunan aduan kemudian dilaporkan pada masyarakat melalui infografis yang dipublikasikan di media sosial, beserta tindak lanjutnya.
3. Mengoptimalkan keberadaan lemari anti gratifikasi untuk menanggapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh peserta pelatihan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

docs.google.com/document/d/1FA0C3RgFRqPULzla00tznV0GjJ1T1S1C9D-Itu2B43Fw/viewform

Phetopex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B...

Phetopex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B... AI Business

 **Kementerian Agama RI**
Balai Diklat Keagamaan Surabaya

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2024

Sapak/ibu yang terhormat,
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2017-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan PAN & RB Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Surabaya berorientasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survey secara online. Tujuan survey ini adalah untuk

docs.google.com/document/d/1FA0C3RgFRqPULzla00tznV0GjJ1T1S1C9D-Itu2B43Fw/viewform

Phetopex | Online F... Google Sheets Tab... Cara Uj. Analisis B... AI Business

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Usia *

Jumlahnya Angka

Pendidikan Terakhir *

SMA/MA

D3

S1

S2

S3

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUBsacZkAw7NGjJ1T3bC3D-B6ZPK3B/viewform

Photos (Online P... Google Sheet T... Ceria (j) Andika S...

Pangkat/Golongan *

Pilih

No. ID *

Jawaban Anda

Instansi *

Cersah, Kerkenerag Kab. Tectan

Jawaban Anda

Unit Tugas *

Jawaban Anda

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUBsacZkAw7NGjJ1T3bC3D-B6ZPK3B/viewform

Photos (Online P... Google Sheet T... Ceria (j) Andika S...

Pelatihan yang Didikut pada Tahun 2024 *

Pilih

Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya disertai untuk transaksi tertentu? (Manipulasi Peraturan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan pemintan imbalan tertentu oleh pelgias? (Penyediaan Jasa)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Penilaian Anda terhubung oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan berkas tersebut? (Menjual Pengaruh)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Layanan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hak-hak yang diterima? (Transparansi)

1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencucian dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencucian)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masalah terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

docs.google.com/forms/d/1TAyQ35NgF8yP0j8kxkKz9KqjJT5tECHO-1foZKCI9w/viewform

Photos (Online P... Google Sheets (Tab... Cika (2) 44833 N...

AI Bismillah

Apakah BDK Surabaya telah terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah BDK Surabaya merespon laporan pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Kirim

Kembalikan formulir

